

Civitas akademika Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM
MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES
 kepada wisudawan dan wisudawati Periode II Tahun 2018
SEMOGA SUKSES DALAM MERAIH MASA DEPAN



Erick Hidayatullah A
201310050311051



Adi Ardiansyah
201310050311141



Yanza Ahaddin Fahmi
201410050311102



Berthi Ramadhani P
201410050311060



Ibnu Kautsar
201310050311010



Ahmad Rofik Zaini
201310050311155



Gina Tika Novianti
201310050311137



Fandri Wahyu R.
201310050311163



Ra. Lutfiyatunnada
201310050311145



Arman Rahman Nampira
201110050311019

**SELAMAT KEPADA MAHASISWA PRODI ILMU PEMERINTAHAN FISIP-UMM
 ATAS DIMUATNYA TULISAN MAHASISWA DI BERBAGAI MEDIA CETAK DAN ONLINE**



Ni'matul Aulia
201610050311016
Judul Artikel:
Jangan Golput, Demokrasi
Tak Akan Kuat, Coblos Saja
Dimuat: tombokkita.com



Malta Ra anisa Agustin
201610050311017
Judul Artikel:
2018, Tahun Politik
dan Pesta Demokrasi
Dimuat: sorotonline.com



Seno Abdul Karim
201710050311015
Judul Artikel:
Batik dan Tendens Monopoli
Dimuat: beritasampit.co.id



Ike Dwi Ambarwati
201710050311070
Judul Artikel:
Kampanye Tebar Pesona
PII KB
Dimuat: [Harian Malang Post](http://HarianMalangPost),
Edisi Rabu, 21 Maret 2018



Amanda Parameshwari
201710050311169
Judul Artikel:
Budaya Politik Korupsi
Dimuat: [Harian Silampari](http://HarianSilampari),
Edisi Jumat, 6 April 2018



Baiq Laila Annisa Ramdhani
201710050311136
Judul Artikel:
Membangkitkan Nafsu
Politik Pemula
Dimuat: [Lombok Post](http://LombokPost),
Edisi Minggu, 8 April 2018



Muhammad Ardi Firdiansyah
201710050311047
Judul Artikel:
Otonomi Daerah Jutuk
Daerah Kabupaten Dompu
Dimuat: indikatorbima.com



Rezkiha Bagas Prakasih
201710050311007
Judul Artikel:
Bangkitnya Pergerakan
Mahasiswa di Kaltim
Dimuat: [Tribun Kaltim](http://TribunKaltim),
Selasa, 10 April 2018



Ardika Rizkian Nurrahmat
201710050311164
Judul Artikel:
Menjalankan Infrastruktur dan
Suprastruktur Politik yang Begitu
Berbungar dalam N-RI
Dimuat: [Koran Stabilitas](http://KoranStabilitas),
Edisi Kamis, 5 April 2018



Muhammad Ikhsanul Jihad
201710050311002
Judul Artikel:
Pengusaha dan Partai Politik
Kabupaten Sumbawa
Dimuat dalam:



Ridha Darnaz
201710050311001
Judul Artikel:
Apakah UU MDS Berpinak
Kepada Rakyat?
Dimuat: indikatorbima.com



Dinda Okta Mevia Fajrina
201710050311170
Judul Artikel:
Tradisi Politik Uang
Menjelang Pemilu
Dimuat: pelaporonline.com

Pengarah Redaksi : Salahudin
 Penanggung Jawab : Asep Nurjaman, Tri Sulisyaningsih, Krishna Hardi, Yana S. Hijri
 Redaktur Pelaksana : Mohammad Kamil
 Tata Usaha dan Dokumentasi : Jainuri, Hevi Kurnia Hardini
 Reporter : Achmad Aprianto, Lisiana Asworo, Iradhat Taqwa S
Diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMM
 Jl. Raya Tlogomas 246 Malang Telp. 0341-466318 Psw.131
 Website : pemerintahan.umm.ac.id
 Email : ipumm.28@gmail.com; ipemumm86@gmail.com
 Redaksi menerima tulisan mahasiswa melalui karya tulis secara bebas, dinamis, dan kreatif.
 Penyerahan naskah tulisan dimulai pada acara wisuda sampai dua minggu sebelum wisuda periode berikutnya.



ProdIP News
 Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP-UMM
Strengthening Effective Government



Diterbitkan Oleh Prodi Ilmu Pemerintahan
 Website: pemerintahan.umm.ac.id

Edisi II/TH XIII/Mei/2018

Salam ProdIP News

**Aktualisasi Pengembangan Mahasiswa
 Melalui Ruang-ruang Intelektual**

Pembaca Prodip News Edisi II 2018 yang budiman, pada salam edisi kali ini Program Studi Ilmu Pemerintahan (Prodi IP) FISIP UMM, dengan bangga menyampaikan beberapa kegiatan Prodi dalam kurun waktu Februari- April 2018. Kegiatan tersebut antara lain kuliah tamu dengan tema "Smart City Sebagai Konsep Sustainable Development, Alumni Bicara, Kunjungan kerja HIMAP ke Komap UMY Yogyakarta, *Studi Exercise* (SE) dan beberapa kegiatan lain yang melibatkan mahasiswa dan dosen.

Prodi IP menyadari sepenuhnya bahwa progresifitas pengembangan program studi dapat ditempuh dengan jalan memberikan

ruang-ruang tepat bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan diri secara maksimal. Semua aktifitas yang dirangkum dalam periode II adalah dalam rangka memfasilitasi aktivitas pengembangan diri dengan memberikan bekal *hard skill* dan *soft skill*.

Kedepannya model-model kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas pengetahuan seperti ini akan terus dilakukan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan UMM sehingga mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM memiliki kapasitas intelektual yang memadai dan berdaya saing tinggi. []

* Pengarah Redaksi,
 dan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMM.



Kenna Prodi Ilmu Pemerintahan UMM
 Sahanda, S.P., M.Si., M.PA.

Government Science Activities

**Perkuat Kelembagaan SATLINMAS di Kelurahan Songgokerto,
 Prodi IP Gelar Koordinasi Penguatan SATLINMAS**

Selasa 20 Maret 2018 dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM yang tergabung dalam Prodi Pengabdian Masyarakat Internal melakukan koordinasi persiapan kerjasama penguatan Satlinmas. Selama ini secara kelembagaan serta dalam menjalankan tugas dan fungsi, anggota satlinmas belum menjalankan peran sesuai dengan Permendagri No 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Selain itu penyelenggaraan keamanan yang dilakukan oleh satlinmas masih belum optimal dan bersifat insidental, seperti melakukan fungsi keamanan menjelang pemilu, membantu pengamanan ketika warga memiliki hajatan serta melakukan kegiatan kebencanaan. Sebenarnya satlinmas memiliki potensi strategis sebagai ujung tombak dalam rangka pertahanan di masyarakat. Namun demikian sebagai penyelenggara keamanan dan ketertiban serta perlindungan terhadap masyarakat,



Tim PPMI Prodi IP sedang berkoordinasi dengan Lurah Songgokerto

khususnya ditingkat kelurahan harapan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keamanan, ketertiban, ketentraman serta perlindungan belum terpenuhi sehingga kehadiran Satlinmas belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, melalui Program Pengabdian Masyarakat, Prodi IP menggelar workshop dan pelatihan di Kelurahan Songgokerto,

Kecamatan Batu. Dalam pelaksanaan pengabdian ini kegiatan workshop dimaksudkan untuk menjawab Permasalahan pemahaman dan penyusunan Standar Operasional (SOP) penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara, pelatihan dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan keterbatasan atas penyelenggaraan pelatihan ketertiban dan keamanan masyarakat. Workshop dan pelatihan ini rencananya akan diikuti oleh 65 anggota satlinmas Kelurahan Songgokerto []

Dosen dan Mahasiswa Prodi IP Hadiri dan Dukung Uji Coba Launching Desa Wisata Bumiaji

Dosen beserta mahasiswa Prodi IP mendapat keistimewaan sebagai tamu dalam acara uji coba *Launching* Desa Wisata Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Batu. Acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan untuk mempersiapkan desa Bumiaji sebagai desa wisata. Dalam uji coba tersebut, dosen dan mahasiswa Prodi IP, FISIP-UMM, diajak untuk berkeliling menikmati berbagai potensi obyek wisata yang dimiliki oleh desa Bumiaji. Mulai dari diajak untuk menikmati jernihnya air Sumber Cinde. Kemudian, diajak turun ke sawah memetik sayuran selada air. Lanjut berwisata religi ke petilasan salah satu tokoh ulama yang berpengaruh di Bumiaji. Setelah itu, rombongan diajak ke peternakan kelinci untuk belajar tentang kelinci pedaging. Dari peternakan kelinci, rombongan bergerak ke kebun bunga untuk memetik bunga, sekaligus dilanjutkan belajar cara merangkai bunga. Kemudian, menuju wisata budaya Omah Slamet yang menyuguhkan wisata anti *mainstream*, yakni menikmati lukisan tidak sekedar estetika, tetapi sarat etika. Setelah puas menikmati



Dosen dan Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan di acara Launching Desa Wisata Bumiaji

lukisan, rombongan mendapat ilmu tentang menanam jambu Kristal organik yang telah memiliki sertifikat bertaraf Internasional.

Di dusun Tlogorejo, Desa Bumiaji, rombongan disambut oleh para penari Sanduk. Tarian ucapan selamat datang yang menjadi keunikan dan kekhasan dari dusun Tlogorejo. Di dusun ini, dosen dan para mahasiswa Prodi IP belajar tentang kearifan lokal yang masih dipelihara dan dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Inilah yang bisa menjadi daya tarik wisatawan yang mulai jenuh dengan wisata-wisata artifisial.

Mulai dari tari Bantengan, pencak silat tradisional, Jaranan, hingga Bedah Bancakan disuguhkan dalam rangkaian uji coba ini. Tentunya, sebagai masyarakat dan kaum intelektual, dosen dan mahasiswa prodi IP mendukung penuh desa Bumiaji sebagai desa wisata yang hendak mengembangkan potensi dan kearifan lokal desa setempat. Harapannya, semoga desa Bumiaji bisa menjadi desa yang tetap menjaga jati dirinya. □

Kuliah Tamu: "Smart City Sebagai Konsep Sustainable Development, Membangun Kota Berkelanjutan"

Pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, bertempat di aula Teknik lantai satu GKB 3 Universitas Muhammadiyah Malang telah diselenggarakan kuliah tamu dengan tema "Smart City Sebagai Konsep Sustainable Development: Mewujudkan Kota Berkelanjutan". Kegiatan yang berlangsung selama tiga jam ini berlangsung dari jam 09.00 WIB sampai jam 12.00 WIB. Adapun tamu undangan yang hadir adalah Bapak Salahudin, S.IP., M.Si., M.PA selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM, Ibu Hevi Kurnia Hardni, MA, Gov selaku moderator, Bapak Yana S.IP., M.IP, Bapak Muhammad Kamil, MA., Listiana Asworo, MA., Iradhat Taqwa, MA, dan Ach Apriyanto Romadhan, S.IP, M.Si., selaku dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan serta mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan. Kuliah tamu juga dihadiri oleh Narin Jaroensappayanon, PhD selaku penerjemah.

Kuliah tamu ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep *Smart City*. Kota cerdas didefinisikan



Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan bersama dengan Narin Jaroensappayanon selaku pembicara pada acara kuliah tamu

sebagai kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi dimana pemerintah, kalangan bisnis dan penduduknya memahami teknologi informasi dan membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi. Untuk mewujudkan kotacerdas diperlukan visi yang jelas dengan memperhatikan tiga faktor, yaitu teknologi, lembaga dan sumber daya manusianya.

Kota cerdas harus didukung dengan inovasi teknologi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Meskipun demikian, inovasi dan penggunaan teknologi bukanlah satu-satunya syarat untuk mewujudkan kota cerdas. Syarat

lainnya yang harus dipenuhi untuk mendukung terwujudnya kota cerdas adalah *social capital* (*spirit, government, culture, social cohesion, art and innovation*) dan *economic capital* (*technology, entrepreneurship, energy, human resource, finance, infrastructure and environment*). Kedua faktor inilah yang membentuk dan menggerakkan terwujudnya sebuah kota cerdas. □

Alumni Bicara: Tantangan Dan Peluang Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Di Era Demokrasi dan Globalisasi

Dalam menghadapi kompetisi global dan proses demokratisasi, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM mengadakan kegiatan kuliah tamu. Kuliah tamu yang diselenggarakan pada hari Rabu, 21 Maret 2018 di Aula Teknik GKB 2 mengusung tema: "Alumni Bicara: Tantangan dan Peluang Mahasiswa Ilmu Pemerintahan di Era Demokrasi dan Globalisasi" dengan pembicara



Sesi foto bersama dosen Prodi Ilmu Pemerintahan dengan pembicara dan mahasiswa

Mohammad Ilham, S.IP. (Wartawan Senior Jawa Pos) yang merupakan alumni Ilmu Pemerintahan UMM. Kuliah tamu ini mampu menumbuhkan semangat serta pengetahuan mahasiswa ilmu pemerintahan dalam menghadapi tantangan dan kompetisi kerja di era global. Tidak lupa juga narasumber memberikan tips agar mahasiswa mampu mengambil peluang di era kompetisi tersebut. Peluang tersebut dapat dicapai jika mahasiswa

ilmu pemerintahan mampu memanaj potensi diri sejak dini, sehingga pemetaan terhadap potensi diri tersebut dapat dijadikan sebagai modal dalam menghadapi era demokrasi dan globalisasi yang sarat akan tantangan dan kompetisi.

Pemateri menyampaikan, bahwasanya perbedaan generasi antara generasi Millennial dan generasi Z merupakan acuan dalam menggali potensi atau kecenderungan generasi-generasi tersebut. Hal ini dikarenakan setiap generasi tentu memiliki tantangan dan peluang yang berbeda-beda. Untuk itu, dirasa sangat perlu bilamana antar generasi tersebut memahami karakteristik generasinya sehingga mampu mengoptimalkan

potensi untuk bersaing secara global.

Selain memberikan wawasan akan tantangan dan peluang dilapangan, pemateri secara implisit menanamkan pembangunan mental (psikis) kepada mahasiswa ilmu pemerintahan yang merupakan peserta seminar melalui pengalaman-pengalaman yang disampaikan narasumber. Hal ini bertujuan supaya mahasiswa mampu mengambil sisi positif dari pengalaman praksis narasumber, sehingga mampu membaca hal-hal yang perlu disiapkan dalam menghadapi era globalisasi, terutama terkait kemampuan individu dalam mengemban karakter yang kuat serta berintegritas. □

Kegiatan Perdana Pers

Dinamika pemerintahan di Indonesia hari ini lekat dengan korupsi. Fakta ini begitu terekam jelas dengan semakin banyaknya Kepala Daerah yang terjatuh kasus korupsi. Data Kemendagri 2017 menyebut ada sejumlah 313 kepala daerah yang terjatuh kasus korupsi. Terbaru sepanjang tahun 2018 ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 8 Kepala Daerah terkait masalah korupsi. Potret buram ini menandakan bahwa korupsi merupakan persoalan terbesar dalam tata kelola pemerintahan (anggaran) di daerah.

Tajuk itulah yang diulas dalam kegiatan perdana Forum mingguan Pecinta Riset dan Menulis (Pers) Ilmu Pemerintahan UMM di 2018. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 6 April 2018 bertempat di ruang PKSP FISIP UMM. Diskusi kritis yang melibatkan lintas angkatan ini berlangsung secara santai namun penuh dengan dialektika pemikiran kritis dari para peserta. Dalam pemaparannya, Hendri Nurhadi Susilo selaku Ketua Pers sekaligus pemateri menyebut bahwa korupsi berlangsung sejak lama dalam leksikon politik Indonesia disebabkan banyak hal seperti budaya permisif masyarakat pada praktek korupsi, biaya politik tinggi, dan lemahnya etika birokrasi.

Musabab tersebut juga diperkuat oleh argumen peserta diskusi yang lain. Korupsi juga berurusan dengan lemahnya penegakan hukum, dinasti politik, *struktural disfungsi* dan *leadership disfungsi*. Program revolusi mental Jokowi untuk menciptakan budaya pejabat politik yang bebas korupsi pada akhirnya belum berhasil. Pada akhirnya, forum ini menyebut ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam sistem politik dan hukum kita untuk menekan angka korupsi. Pertama, soal penegakan hukum yang bisa memberikan efek jera. Kedua, rekayasa maksimal sistem pemerintahan melalui penerapan *E-Government* agar transparansi pengelolaan kekuasaan daerah tercipta. Ketiga, pengawasan (*watch dog*) masyarakat sipil khususnya mahasiswa perlu ditingkatkan lagi sehingga mekanisme *check and ballance* yang maksimal akan memaksa pemerintah untuk bertidak akuntabel. □



Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Salahudin, S.IP, M.Si, M.PA sedang memberikan pengantar sebelum kegiatan diskusi dimulai.

Program KBA

Globalisasi membuat sekat batas dunia internasional menjadi tidak terlihat. Pergaulan lintas negara semakin terintegrasi. Pun demikian dalam kehidupan akademis, globalisasi menuntut luaran ruang-ruang akademis (perkuliahan)

memiliki keterampilan salah satunya berbahasa asing sebagai kompetensi unggulan. Bahasa tersebut adalah alat komunikasi dalam interaksi sosial internasional yang sangat menentukan proses adaptasi mahasiswa untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam ruang globalisasi.

Kondisi itulah yang membuat Prodi Ilmu Pemerintahan (IP) UMM perlu melakukan rekayasa kebijakan program Kuliah Bahasa Asing (KBA). Mahasiswa IP didorong untuk memiliki kecakapan bahasa asing sehingga ketika lulus dapat menunjang peluang kerja dalam era globalisasi ini. Prodi IP sangat perlu membekali mahasiswa dalam menjawab tantangan tersebut dengan mewajibkan semua mahasiswa semester 3 dan 4 mengikuti kegiatan ini.

Semangat tersebut disosialisasikan ke mahasiswa pada tanggal 2018. Dalam prakteknya perkuliahan KBA akan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Mahasiswa boleh memilih Program KBA yang disediakan yakni bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis dan bahasa Jerman. Nantinya, sertifikat kelulusan KBA akan menjadi syarat bagi mahasiswa dalam mengajukan magang Pemerintahan dan skripsi. Program KBA ini juga dirancang untuk menyukseskan program prodi IP UMM yang menjadikan kemampuan bahasa asing sebagai kompetensi unggulan mahasiswa dan lulusan Prodi IP UMM. □

Kiprah Mahasiswa

Jajaki Kerjasama Tahun 2018, HIMAP FISIP-UMM Lakukan Kunjungan Kerja Ke KOMAP UMY

Rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja HIMAP terhitung sejak keberangkatan pada tanggal 20 Februari sampai tanggal 22 Februari 2018 ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 45 fungsionaris HIMAP, yang terdiri dari 5 formatur dan 40 anggota aktif. Kegiatan inti dari Kunjungan Kerja HIMAP UMM tahun 2018 ini diadakan di Sportarium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018



H MAP UMM dan HIMAP UMY dalam sesi foto bersama

dari pukul 09.15 sampai pukul 12.20 WIB. Kegiatan ini berupa *sharing* program kerja antara KOMAP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan HIMAP Universitas Muhammadiyah Malang. Output atau hasil yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah kedua organisasi ini dapat saling mengevaluasi kinerja, mengadaptasi program-program kerja serta metode-metode yang bisa digunakan untuk keberlangsungan dan kesuksesan HIMAP maupun KOMAP. □

GOVERNMENT COOPERATION

(Studi tentang Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata di Tanjung Kelayang, Bangka Belitung)

Rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki beberapa prioritas dalam mengembangkan sektor pembangunan di Indonesia, sektor prioritas tersebut ialah pangan, energi, maritim, pariwisata, dan kawasan industri. Pariwisata menjadi sektor prioritas karena dianggap sebagai penyumbang PDB, Devisa dan Lapangan kerja yang murah dan mudah. Akan tetapi sebelumnya adapun permasalahan pariwisata di Indonesia yaitu pembangunan pariwisata lebih berkonsentrasi pada kawasan Jawa-Bali saja. Sehingga pariwisata lainnya tidak dapat berkembang dengan merata.

Terkonsentrasinya pariwisata pada kawasan Bali saja menyebabkan beberapa dampak yang ditimbulkan seperti lemahnya perencanaan pariwisata di Indonesia, rendahnya fasilitas penunjang pariwisata yang terbangun dan Indonesia hanya bertumpu pada satu pintu gerbang utama wisatawan mancanegara yaitu Bali. Sekretariat Deputy Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata pernah mengatakan bahwa "pariwisata itu parameternya adalah wisatawan mancanegara". Maka ketika tidak ada wisatawan mancanegara yang berwisata ke Indonesia maka pariwisata tidak akan berkembang dengan baik, apalagi ditambah pintu gerbang wisatawan mancanegara Indonesia hanya Bali. Dengan demikian, harus adanya peran pemerintah pusat dan daerah yang mampu mendorong dan mendukung program dibentuknya pintu gerbang lainnya bagi pariwisata Indonesia.

Pada tahun 2016, Presiden Jokowi memberikan 8 arahan dengan topik "Tahun 2016 adalah Tahun Percepatan" sebagaimana dalam Surat Setkab No: B- 652/Seskab/Maritim/11/2015, tanggal 6 November 2015. Salah satu arahan tersebut adalah pastikan kemajuan di lapangan pada 10 destinasi wisata nasional. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata menyebut destinasi wisata nasional tersebut sebagai "10 Bali Baru". Bali baru ini sebagai jawaban ditahun sebelumnya yang mendukung adanya pintu utama masuknya wisatawan lainnya.

Destinasi prioritas tersebut dipilih sebagaimana dalam Surat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Nomor S-54/Menko/Maritim/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang 10 Destinasi Prioritas Pariwisata di Indonesia yang salah satunya Destinasi Tanjung Kelayang di Bangka Belitung. Destinasi tersebut merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang tercantum dalam UU No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Perencanaan Pariwisata Nasional dan untuk pengembangan KSPN tersebut, Kementerian Pariwisata memberikan dukungan terkait kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke pemerintah daerah sebagai dukungan pengembangannya.

Sebelumnya Destinasi Tanjung Kelayang sebelumnya belum memiliki pengelolaan khusus dan kurang dapat menarik wisatawan mancanegara yang hanya mencapai 3.206 wisman di tahun 2014. Pengembangan destinasi prioritas ini tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat tetapi juga menjadi domain pemerintah Provinsi dan Kabupaten sehingga diperlukannya sebuah kerjasama melalui koordinasi, sinkronisasi dan komitmen.

Adapun keistimewaan dalam pengembangan Destinasi Tanjung Kelayang yaitu destinasi tersebut tidak hanya dikelola dalam ranah KSPN melalui Dekonsentrasi dengan integrasi institusional, integrasi fungsional, dan integrasi program ke



Berthi Ramadhani P.
201410050311060

pemerintah daerah tetapi juga ditetapkan sebagai KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Tanjung Kelayang dengan Konsep *ABC&M* (*Akademisi, Bisnis, Community, Government, Media*). Dengan demikian, kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan destinasi prioritas Tanjung Kelayang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu "Model Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Destinasi Prioritas Tanjung Kelayang dengan Status KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional)" dan "Model Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Destinasi Prioritas Tanjung Kelayang dengan Status KEK (Kawasan Ekonomi Kreatif)".

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam status KSPN Tanjung Kelayang ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yaitu kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah (Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung) tidak maksimal yaitu hanya ada 4 kegiatan yang dapat diusulkan dari 18 kriteria melalui DAK, dan hanya ada 6 kegiatan yang dapat diusulkan dari 14 kriteria melalui Dana Dekonsentrasi; belum terbentuknya UPT Provinsi di Belitung sehingga koordinasi sulit dilakukan; tidak ada alokasi Dana Bantuan ke Pemerintah Kabupaten sehingga tidak ada relasi koordinasi antara Pem. Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Pem. Kabupaten Belitung;

Sedangkan kerjasama oleh pemerintah pusat dan daerah

dalam status KEK Tanjung Kelayang juga masih terdapat beberapa permasalahan yaitu kurangnya sinkronisasi Pem. Provinsi dengan Pem. Kab. Belitung terkait pengembangan bidang promosi/pemasaran, yang dimana Pem. Provinsi dominan mempromosikan wisata-wisata yang ada di Bangka, padahal destinasi prioritas ada di Belitung; Pem. Provinsi kurang mengikutsertakan/melibatkan Pem. Kabupaten dalam kegiatan pengembangan Tanjung Kelayang; Pem. Kabupaten dianggap gagal dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pelestarian lingkungan wisata

Selain itu juga terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan destinasi Tanjung Kelayang. Faktor penghambat tersebut ialah kurangnya

aksesibilitas khususnya transportasi, lemahnya SDM masyarakat, kurangnya pengelolaan nilai-nilai budaya sebagai ciri khas daerah Belitung, sedangkan faktor pendukungnya ialah banyaknya wisatawan mancanegara, daya tarik wisata yang sudah terkenal.

Maka, adapun saran yang dapat diberikan yaitu Perlunya pembentukan UPT Pemerintah Provinsi di Belitung untuk mempermudah koordinasi dengan Pem. Kabupaten; Pemerintah Kabupaten Belitung (Dinas Pariwisata) harus dapat melihat peluang dan memaksimalkan kegiatan yang dapat diajukan melalui DAK, sehingga dana tersebut dapat dimaksimalkan untuk peningkatan pengembangan destinasi prioritas Tanjung Kelayang; Perlunya sinkronisasi dan koordinasi kembali bidang pengembangan promosi/pemasaran yang sebelumnya lebih mengembangkan wisata-wisata di Bangka, seharusnya mengutamakan promosi/pemasaran wisata di Belitung khususnya destinasi Tanjung Kelayang; Pemerintah Provinsi harus lebih mengikutsertakan Pem. Kabupaten dalam pengembangan Tanjung Kelayang di bidang promosi/pemasaran; Pemerintah Kabupaten harus mampu merubah "mindset" masyarakat untuk lebih sadar akan wisata dan lingkungan sekitar melalui sosialisasi yang lebih matang. []

Menanggulangi Kerentanan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan

Pengentasan kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu mendapat perhatian dan menjadi prioritas utama setiap rencana kebijakan pembangunan di Indonesia. Setiap kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dibuat di harapkan mampu menjadikan masyarakat berdaya dibidang social dan ekonomi sehingga kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera. Namun sampai sejauh ini, dari berbagai program yang dilaksanakan belum terlihat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah penduduk miskin Desa yang cenderung lebih tinggi dibanding jumlah penduduk miskin kota. Dilansir oleh BPS pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin desa mencapai 16,31 juta jiwa, sedangkan penduduk miskin kota berjumlah 10,27 juta jiwa. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh jauhnya keberadaan desa dari pusat perekonomian, rendahnya sumberdaya manusia, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur pedesaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berpihak kepada masyarakat desa menjadi urgen. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terhanyak di Indonesia yang mencapai 4.405,27 atau 11,20%. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan tersebut, Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran belanja untuk masyarakat miskin pedesaan. Hal ini terwujud dalam kebijakan Program Jalin Matra PK2 yang ditetapkan dalam RMD 2014-2019 dan diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan Program Jalin Matra. Program tersebut merupakan program penanggulangan kemiskinan untuk masyarakat rentan miskin pedesaan. Masyarakat rentan miskin diartikan sebagai masyarakat yang sangat dekat dengan garis kemiskinan "near poor" namun secara administratif mereka bukanlah golongan miskin, tetapi memiliki kemungkinan yang besar untuk menjadi miskin. Oleh karena itu, kebijakan jalin matra PK2 ini bertujuan untuk memberikan akses permodalan finansial dan sosial kepada masyarakat rentan agar lebih sejahtera.

Pada tahun 2016 ada 161 Desa yang menjadi Target pelaksanaan Program Jalin Matra, Salah satu desa yang menjadi sasaran kebijakan Program Jalin Matra adalah Desa Ngroto. Sebagai Desa dengan potensi sumber daya yang melimpah, belum mampu menjadikan desa Ngroto sebagai desa yang bebas dari belenggu kemiskinan. Tercatat dalam Profil Desa Ngroto dari total 1909 Kepala Keluarga yang ada terdapat 734 Kepala Keluarga yang ada di Desa Ngroto masuk dalam indikator masyarakat miskin. Selain itu, kondisi kemiskinan ini diperparah oleh lingkungan eksternal. Banyak masyarakat Desa Ngroto yang terjerat hutang kepada rentenir berupa Bank keliling, kebutuhan serta tawaran yang diberikan secara terus menerus dari rumah kerumah oleh Bank Keliling menjadikan masyarakat tergiur untuk menggunakan jasa pinjaman dari Bank keliling sebagai sumber permodalan utama dalam mengembangkan usahanya meski dengan bunga yang tinggi. Tentu kondisi tersebut menjadikan masyarakat sulit berkembang bahkan bisa terperosok menjadi lebih miskin.

Anggaran yang digunakan dalam Pelaksanaan Program Jalin Matra merupakan anggaran yang berasal dari bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah). Bantuan anggaran ini digulirkan kepada Desa yang menjadi sasaran kebijakan yang kemudian dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang bekerjasama dengan pendamping Desa serta Kelompok masyarakat (Pokmas) sebagai sasaran kebijakan. Kebijakan Jalin Matra dilaksanakan



Oleh: Ka. Lutfiyatunnada

dengan mengutamakan lima prinsip dasar yaitu, membantu dengan hati, transparansi dan partisipasi masyarakat. Di Ngroto terdapat 477 Rumah tangga dengan indikator hampir miskin. Rumah tangga hampir miskin ini merupakan sasaran kebijakan, Jalin Matra, data ini diperoleh dari Data Program Perlindungan Sosial PPLS 2011. Data tersebut kemudian diverifikasi ulang dengan menilai kondisi perekonomian Rumah Tangga Sasaran (RTS) saat pengajuan, serta kelayakan usaha. Tujuannya, agar program tersebut diberikan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan. Pinjaman modal murah diberikan secara bergilir kepada rumah tangga rentan miskin sebagai sasaran kebijakan, yang nantinya digunakan sebagai modal pengembangan usaha produktif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendapatan yang akan di terima oleh RTS, dengan meningkatkan jumlah pendapatan tersebut maka kesejahteraan RTS juga akan meningkat.

BUMDesa, Pendamping Desa, serta Pokmas berkerjasama dalam rencana pelaksanaan Program seperti rebug warga, pembentukan Pokmas, penyusunan rencana usaha, serta realisasi anggaran. Tidak hanya itu, mereka juga berkolaborasi pada proses keberlanjutan program seperti koordinasi dan pemantauan keberlanjutan program. Keberhasilan suatu tujuan pelaksanaan Program dapat disebabkan oleh kerjasama yang baik antar aktor yang terlibat. Pada tahap pertama pencairan, tahun 2016 terdapat 35 RTS yang mendapatkan pinjaman murah jalin matra, jumlah tersebut terbagi kedalam 6 kelompok, dan saat ini sudah terdapat 98 RTS yang mendapatkan bantuan Pinjaman Jalin Matra. Peningkatan jumlah RTS yang menerima bantuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat pengembalian pinjaman oleh RTS berupa pinjaman pokok dan jasa sebesar 0,8% yang kemudian selisih keuntungan dari pengembalian pinjaman tersebut oleh BUMDesa digulirkan untuk RTS lain, sehingga semakin banyak RTS yang mendapatkan pinjaman permodalan tersebut maka akan semakin banyak Rumah tangga yang rentan akan terbantu permodalannya.

Namun, pada perkembangannya rendahnya komitmen RTS serta kurangnya koordinasi antara BUMDesa dengan Kelompok masyarakat memunculkan permasalahan dalam pelaksanaan Program Jalin Matra sebagai program penanggulangan kerentanan kemiskinan, sehingga memperlambat keberlanjutan program. Rendahnya komitmen ini ditandai dengan banyaknya RTS yang belum melakukan pengembalian dana pinjaman mencapai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Permasalahan tersebut dipicu dari karakter RTS yang memang tidak memiliki komitmen untuk mengembalian pinjaman atau bisa juga pinjamannya dialihkan untuk kepentingan pribadi RTS bukan untuk pengembangan usaha, atau bisa juga disebabkan oleh jenis usahanya yang tidak mengalami perkembangan, sehingga RTS tidak bisa melakukan pengembalian pinjaman. Selain itu, rendahnya komitmen ini menyebabkan proses pengajuan pinjaman yang dilakukan secara kelompok menjadi lebih individu yang disebabkan oleh hilangnya rasa saling ketergantungan antara anggota kelompok. Padahal pengelompokan ini sendiri bertujuan untuk memudahkan proses koordinasi dalam pelaksanaan agar lebih efektif. Untuk menyelesaikan Permasalahan ini membutuhkan koordinasi lebih intensif antara Pemerintah Desa, BUMDesa, Kelompok Masyarakat serta Pendamping Desa untuk mencari jalan keluarnya, selain itu koordinasi juga dibutuhkan untuk modal sosial berupa *Life Skill* serta pendampingan dan pengawasan perkembangan Program mengingat program ini merupakan program yang berkelanjutan, maka keberlangsungan program sangat dipengaruhi oleh komitmen antar pelaksana agar tujuan Kebijakan sebagai penanggulangan kerentanan Kemiskinan dapat menjadikan masyarakat lebih sejahtera. []

Innovative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Social Empowerment Pada Pemerintah Kota Batu

Manajemen pengelolaan sampah di Indonesia selama ini belum dikelola secara baik. Salah satu penyebabnya dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam manajemen pengelolaan sampah. Padahal jika dibiarkan tanpa adanya peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sampah, sampah dapat menjadi penyebab munculnya konflik sosial, penyakit, konflik lahan dan biaya yang tidak sedikit untuk menanggulangi segala kerugian tersebut.

Mengingat begitu pentingnya pengelolaan sampah, pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi tentang pengelolaan sampah, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengolahan Sampah. Menurut kedua peraturan diatas sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Sedangkan pengelolaan sampah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal pengelolaan sampah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat beserta strategi dalam pengelolaan sampah harus dijalankan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Maka dari itu pengelolaan sampah merupakan hal yang wajib pula dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu.

Pengelolaan sampah di Kota Batu menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu mendapatkan tugas untuk menjaga kebersihan dan masalah pengelolaan sampah di Kota Batu sejak tahun 2017, sebelumnya tugas ini menjadi tanggungjawab dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu. Walaupun demikian pemerintah kota Batu belum memiliki landasan yuridis dalam manajemen pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sampai saat ini belum juga disahkan menjadi produk hukum dikarenakan belum dilandaskan oleh Walikota Batu. Tidak adanya payung hukum yang menaungi pengelolaan sampah, maka eksistensi Kota Wisata Batu akan terancam.

Namun demikian Pemerintah Daerah Kota Batu tergolong cukup inovatif dalam pengelolaan sampah. Pemerintahan inovatif (Purwo Santoso, 2016) adalah pemerintahan yang mengkondisikan, memfasilitasi dan meregulerkan praktek-praktek inovatif dalam pengelolaan kepentingan publik. Dalam sistem itu, ada elemen pemerintah dan ada juga elemen masyarakat/rakyat/warga negara. Lebih dari itu, sistem digerakan oleh interaksi antara keduanya. Selain itu hasil *benchmarking* teoritis dari *Global Innovation Index* dan *Government Innovation Index* di Korea Selatan (LAN, 2016 : 42) bahwa pemerintah bisa dikatakan inovatif merupakan pemerintah yang memiliki input 10 indikator pemerintah inovatif. Adapun 10 indikator tersebut yaitu visi inovasi, komitmen perubahan, reward bagi inovator, kebijakan pendorong inovasi, kapasitas sumber daya manusia inovasi, kepedulian sumber daya manusia terhadap inovasi, pengembangan sumber daya inovasi, dukungan anggaran,



Oleh: Yenza Ahaddin Fahmi

optimalisasi CSR dalam mendukung inovasi, dan penggunaan IT (teknologi informasi) dalam sistem kerja

Sedangkan indikator pemerintahan inovatif menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam *Innovative Governance Award* Tahun 2017 ada 5 indikator. Adapun 5 indikator tersebut adalah inovasi minimal telah berjalan 2 tahun, memiliki keaharuan dan keunikan, melibatkan peran masyarakat serta *stakeholder*, dibiayai APBD dan atau pembiayaan yang sah dan memberikan dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa indikator pemerintahan inovatif memiliki ciri-ciri yaitu bertujuan untuk kepentingan bersama atau masyarakat, tidak untuk kepentingan pihak tertentu, memiliki pembiayaan/anggaran jelas serta melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Artinya inovasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk memberdayakan masyarakat.

Social Empowerment atau pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Dari kedua indikator inovatif diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat lima indikator pemerintahan inovatif yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu: pertama adalah dampak inovasi bagi daerah dan masyarakat, kedua, pengembangan sumber daya inovasi, ketiga dukungan anggaran atau pembiayaan, sah lainnya, keempat, berorientasi pada kepentingan umum serta kelima yaitu melibatkan peran serta masyarakat. Apabila diukur dari kelima indikator pemerintahan inovatif tersebut, inovasi yang dilakukan Pemerintah kota Batu dalam pengelolaan sampah saat ini adalah mengelola sampah menjadi gas metan dan pupuk cair organik, pengembangan sumber daya inovasi yaitu dengan cara menambah hanggar baru sebagai mesin pengolah sampah, berorientasi pada kepentingan umum adalah saat ini pelayanan TPA Tlekung sudah melayani seluruh kecamatan yang ada di Kota Batu, anggaran untuk pengelolaan sampah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sedangkan keterlibatan peran serta masyarakat banyak yang aktif pada komunitas-komunitas yang peduli lingkungan dan sampah, bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batu serta aparat TNI dan Kepolisian, komunitas tersebut antara lain komunitas bank sampah temas bersinar di Kelurahan Temas dan komunitas Sapu Bersih Nyemplung Kali. []

Analisis Implementasi Kebijakan Publik

(Studi Tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan Dan Anak Jalanan Di Kota Malang)

Dilihat dari kondisi Kota Malang saat ini, salah satu permasalahan sosial, yang dihadapi oleh pemerintah Kota Malang adalah permasalahan kemiskinan. Indikasi yang menunjukkan masalah kemiskinan yang terjadi di Kota Malang ditunjukkan dengan masih banyaknya pengemis, gelandangan dan anak jalanan. Selama ini permasalahan sosial tentang kemiskinan dan



Oleh: Gina Tika

gelandangan selalu di dihadapkan pada persoalan struktur dan kultur yang ada di masyarakat. Upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut telah diupayakan oleh pemerintah Kota Malang melalui penertiban peraturan larangan melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012.

Selain kebijakan tersebut pemerintah Kota Malang juga mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang penanganan pengemis, gelandangan dan anak jalan dengan tujuan untuk meminimalisir jumlah pengemis, gelandangan dan anak jalanan di Kota Malang. Penanganan yang dilakukan ada 3 tahapan yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Melalui kebijakan ini pemerintah daerah memberikan tanggung jawab kepada Dinas Sosial sebagai implementor. Sebagai pelaksana Dinas Sosial telah melaksanakan 3 tahap penanganan sesuai dengan isi Peraturan daerah. Dalam usaha preventif, pemerintah daerah pemerintah telah melakukan sosialisasi berupa himbauan terhadap orang yang masih meminta-minta di sekitar Kota Malang. Selain itu Dinas Sosial dan Satpol PP juga melakukan himbauan kepada masyarakat berupa pamflet bertuliskan larangan untuk memerikan uang ataupun barang bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan dan anak jalanan.

Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah represif. Pelaksanaan pada tahap ini yaitu terlaksananya penertiban yang dilakukan Satpol PP serta adanya pengawasan dari Dinas Sosial. Penertiban dilakukan jika mereka yang telah mendapatkan peringatan tetapi masih tetap saja berada pada lokasi yang dilarang. Penertiban dilakukan bisa sewaktu-waktu 2-3 kali dalam seminggu. Lokasi penertiba biasanya dilakukan di area area umum seperti pasar, emperan toko, serta perempatan lampu merah. Untuk langkah selanjutnya yaitu tahapan rehabilitasi. Pada tahapan ini, rehabilitasi/penanganan dilakukan oleh Dinas sosial yang juga bekerjasama dengan beberapa UPT di Jawa Timur, BLK Singosari, SMA, SMK, Universitas, Dinas Kesehatan Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Semua pihak pelaksana kebijakan ini memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Para pengemis, gelandangan dan anak jalanan tidak semuanya berada di bawah pengawasan Dinas Sosial Kota Malang, tetapi mereka juga akan di serahkan kepada UPT rehabilitasi sosial dan ada juga yang diserahkan ke BLK untuk dilakukan pelatihan kerja guna meningkatkan keahlian untuk bisa lebih mandiri. Sebelum di tempatkan di berbagai tempat tersebut, warga binaan tersebut menempati Liponsos. Liponsos merupakan bangunan untuk tempat tinggal

sementara. Mereka di liponsos akan assesment terkait identitas lengkap dan kebutuhan yang dibutuhkan. Dengan begitu Dinas sosial dapat mengetahui apa yang dilakukan selanjutnya. Selain di UPT dan BLK, mereka yang terkena razia juga ditempatkan di suatu tempat yaitu kampung topeng. Kampung topeng merupakan wujud dari salah satu program dari Kementerian Sosial yaitu program Desaku Menanti. Program ini juga salah satu wujud penanganan dari pengemis, gelandangan dan anak jalanan. Disana mereka diberi fasilitas rumah beresta isinya, diberi pondanaan untuk usaha ekonomi produktif serta diberikannya pelatihan pelatihan seperti pelatihan pembuatan topeng, pelatihan pembuatan berbagai macam kripik dan krupuk. Tujuannya yaitu agar masyarakat tidak kembali kejalanan dan merasa terpenuhi kebutuhannya di kampung tersebut.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 sudah dilaksanakan dengan baik. Komitmen dari pelaksana implementasi juga bisa dikatakan baik dan berjalan sesuai strategi yang direncanakan. Tetapi memang masih banyaknya jumlah pengemis, gelandangan dan anak jalanan. Pemerintah Daerah tidak bisa bila membuat Kota Malang bersih dari Gepeng dan Anjal karena mereka selalu datang bergantian dari luar Kota Malang. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini, Pemerintah Daerah memiliki beberapa hambatan yaitu masih kurangnya penampungan sementara untuk para gepeng dan anjal yang terkena razia. Selain itu kurangnya sumber daya manusia dan finansial untuk penanganan warga binaan. Sehingga keinginan untuk meningkatkan fasilitas penanganan menjadi terhambat. Ada satu hambatan yang sangat simple tetapi sangat berpengaruh besar untuk pelaksanaan peraturan daerah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung larangan memberikan uang kepada gepeng dan anjal. Karena masyarakat lah yang memberikan racun kepada pengemis, gelandangan dan anak jalanan tersebut. Disini pemerintah daerah terutama dari Dinas Sosial berharap agar masyarakat tidak lagi memberi berupa barang atau apapun dengan berbagai alasan kepada mereka agar peraturan daerah ini dapat hekerja dengan dengan maksimal. Sebuah kebijakan tidak akan bisa berjalan dengan berhasil tanpa adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri. []

PROFIL DAN INFORMASI PENDAFTARAN PRODI ILMU PEMERINTAHAN

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Visi Menjadikan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM sebagai pusat pendidikan yang unggul dalam pengembangan ilmu serta praktik pemerintahan bertaraf internasional untuk mendukung terwujudnya *Effective Government* sebagai pengejawantahan nilai-nilai Islam.

- Misi**
1. Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan pola pikir, wawasan, dan keterampilan mahasiswa di bidang Ilmu Pemerintahan yang berorientasi pada pemerintahan daerah (*local government*) yang berdaya saing internasional.
 2. Mengembangkan riset dan kajian Ilmu Pemerintahan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif (*effective government*).
 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sipil (*civil society*).
 4. Meningkatkan jaringan kelembagaan yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi (TKI).
 5. Meningkatkan kompetensi keilmuan dan keterampilan pemerintahan bagi mahasiswa agar berdaya saing internasional dan berakhlak mulia.

Tujuan Pembelajaran :

1. Menguasai dasar-dasar Ilmu Pemerintahan dan keterampilan dasar bidang Pemerintahan.
2. Mampu mengidentifikasi permasalahan di Bidang Pemerintahan.
3. Mampu menceklistipikan dan menganalisis permasalahan pemerintahan secara komprehensif dan akurat.

4. Menguasai prinsip dasar demokrasi guna mewujudkan masyarakat sipil yang berdaya (*civil society*).
5. Memiliki kepekaan dan tanggung jawab etik dalam mengemban amanah sebagai ilmuwan dan praktisi Ilmu Pemerintahan.

Tempat Pendaftaran :

UPT PMB Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 6514, Telp. 0341-464318-19 Psw. 139, Fax. 0341-460435, 460782, e-mail: pmb@umm.ac.id.

Pendaftaran on-line : pmb.umm.ac.id, call center: +62 341 463513.

Jalur Pendaftaran :

Program Jalur Undangan/ Jalur Prestasi & UMDK; Program Reguler; Program Beasiswa Khusus Yatim / Yatim-Patu; Program Beasiswa FPU; Program Transfer dan Alih Jenjang

Prosedur Pendaftaran :

- a. Mengisi biodata peserta secara *online* pada pmb.umm.ac.id
- b. Melakukan pembayaran secara transfer melalui BNI No. Rek. 6006002464 (Tidak menerima transfer pembayaran via ATM/SMS Banking/ e-Banking)
- c. Formulir cetak *online* dan semua berkas syarat pendaftaran dimasukkan dalam amplop coklat dan dikirim ke alamat: UPT PMB Universitas Muhammadiyah Malang Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
- d. Pengiriman Berkas pendaftaran melalui pos dan *cepat*.